

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Arifin, Firmansyah dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Azhary, Muhammad Taher. 1987. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Benveniste, Guy. 1989. *Birokrasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Jajim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parleментар dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Le Roy, Crince. 1981. *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*. Diterjemahkan oleh Soehardjo. Semarang.
- Maheka, Arya. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahfud M.D. Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Mamudji, Sri dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djembatan.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, Sri. 1984. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali, 1984.

- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press.
- Syahbudin, Budi dan Adib Achmadi. 2006. *Di Balik Palu MA: Mendudukkan Perdebatan Retroaktif*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Tauda, Gunawan A. 2012. *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: GENTA Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi Dengan Tugas, Fungsi Dan Susunan.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Komisi 4.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1970 tentang Membubarkan Komisi IV yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970.

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-08/XII//2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **C. Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 03P/HUM/2000 tanggal 23 Maret 2001.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tanggal 8 Februari 2018.

#### **D. Disertasi**

Kamis, Margarito. 2004. *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia (studi sosiolegal atas pembatasan Presiden oleh MPR 1999-2002)*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

#### **E. Artikel**

Asshiddiqie, Jimly. "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 13 Juni 1998.

#### **F. Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

*Corrupt Practices Investigation Bureau*, <https://www.cpiib.gov.sg>. 1 Februari 2018.

*Independent Commission Against Corruption Ordinance*, <http://www.icac.org.hk>. 1 Februari 2018.

*Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia*, <http://www.sprm.gov.my>. 1 Februari 2018.

KPK, *KPK Lakukan 19 Kali OTT Sepanjang Tahun 2017*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4140-kpk-lakukan-19-kali-ott-sepanjang-tahun-2017>.

KPK, *Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia di Angka 37*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4164-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37>.

KPK, *KPK Tahan Empat Tersangka Dugaan Suap Walikota Kendari*, <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4167-kpk-tahan-empat-tersangka-dugaan-suap-walikota-kendari>.

KPK, *Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2017*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4139-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2017>.

Suparman, Arman (KPPOD), *Indonesia Darurat Korupsi di Daerah*, <https://www.kppod.org/berita/view?id=629>.